

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pasar merupakan salah satu lembaga yang paling penting dalam institusi ekonomi dan salah satu penggerak dinamika kehidupan ekonomi. Berfungsinya lembaga pasar sebagai institusi ekonomi tidak terlepas dari aktivitas yang dilakukan oleh penjual dan pembeli (Damsar, 2002: 83). Sebagai salah satu kegiatan ekonomi, pasar merupakan sarana untuk melihat hubungan masyarakat dengan aktivitas ekonomi (Effendi, 1996: 4 dalam Unayatus, 2016: 1). Pasar secara otomatis dapat mengatur kehidupan sosial termasuk ekonomi karena pencapaian kepentingan pribadi dan kesejahteraan individu akan membawa hasil yang terbaik, tidak hanya mereka sebagai pribadi tetapi juga kepada masyarakat secara keseluruhan (Mustafa, 2008 dalam Tissa, 2016: 1).

Pada umumnya, pasar di Indonesia telah berkembang dengan pesat sesuai dengan perkembangan dan kemajuan yang ada di daerahnya. Terlihat dengan adanya pasar modern seperti mall, plaza, *hypermarket*, *supermarket*, dan butik-butik yang cenderung keberadaannya terdapat dipusat kota (Sari, 2009:1 dalam Unayatus). Pasar modern menjadi bukti dari perkembangan pasar di Indonesia saat ini. Namun disisi lain, terdapat pasar tradisional yang juga tempat bertemunya antara penjual dan pembeli. Seiring dengan perkembangan zaman dan semakin majunya teknologi, pasar tidak hanya sebagai tempat terjadinya transaksi jual-beli bagi masyarakat yang ada disekitar pasar, lebih dari itu pasar telah dijadikan sebagai sarana penggerak roda perekonomian dalam skala besar (Yulianti, 2011: 1).

Pasar tradisional dicirikan dengan terdapatnya hubungan antara pedagang dan pembeli secara langsung. Hubungan pedagang dan pembeli terjadi secara spontan, terang-terangan dalam tawar-menawar dan dengan transaksi yang jelas. Ciri Pasar Tradisional terdapat pada pasar nagari yang dimiliki oleh nagari-nagari di Sumatra Barat, sebagai kesatuan wilayah hukum adat ditandai dengan adanya nagari sebagai wilayah otonom mempunyai harta kekayaan. Pasar tradisional hanya ramai pada hari tertentu (tidak setiap hari). Pasar awalnya muncul di tempat strategis seperti simpang jalan, atau terminal angkutan umum (Abbas, 2003: 3).

Pasar nagari adalah sebuah pasar yang berdiri di sebidang tanah ulayat nagari. Pasar yang memanfaatkan tanah ulayat nagari sebagai lokasi pasar harus dibawah pengawasan Kerapatan Adat Nagari yang terdiri dari pada penghulu pemimpin suku (Effendi, 2001: 11).

Pentingnya pasar nagari di Sumatera Barat terlihat dari keberadaan yang dapat ditemukan hampir disetiap nagari. Di Sumatera Barat, pasar nagari berperan penting dalam ekonomi dan infrastruktur. Pentingnya pasar nagari dapat dilihat sebagai wadah perekonomian masyarakat, berjumlah lebih banyak dari pasar bukan nagari, tersebar diseluruh daerah, dan salah satu syarat atau komponen ekonomi nagari (Abbas, 2003: 7)

Istilah nagari di Minangkabau berasal dari bahasa Sanskerta yaitu *nagara* (Radjab, 1969: 12 dalam Abbas, 2003: 7). Penduduk nagari merupakan kesatuan sosial budaya, dan kepercayaan yang diikat oleh satu kehendak hidup bersama. Historiografi dan etnografi Minangkabau menekankan bahwa nagari adalah kesatuan sosial utama khas Minangkabau (Manan, 1995 dalam Abbas, 2003: 7).

Pasar nagari menjadi bagian dari struktur nagari yang berbeda dibawah pengawasan kerapatan nagari "*Nagari Council*" ini artinya pasar secara langsung atau tidak langsung akan menjadi media kepentingan politik nagari yang tergambar didalam suatu pengelolaan pasar nagari (Effendi, 2001: 9).

Sebelum tahun 1980, Wilayah Lubuk Kilangan berbentuk sebuah kenagarian yang berada di bawah wilayah administratif Kabupaten Padang Pariaman. Lubuk Kilangan sebagai sebuah pemerintahan kenagarian juga memiliki pasar-pasar nagari sebagai salah satu sumber kekayaannya. Ada dua buah pasar nagari di Lubuk Kilangan yang dikenal oleh masyarakat yaitu pasarnagari yang terletak di Bandar Buat yang dikelola oleh pemerintah atau dinas pasar dan pasar nagari yang terletak di Indarung dikelola oleh LPMK (Unayutas, 2016: 1-2).

Setelah diresmikannya Kota Padang menjadi Ibukota Propinsi Sumatera Barat berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 29 Tahun 1979, maka disetujui dan disahkan perluasan dan perubahan batas wilayah Kota Padang. Pengesahan tersebut dinyatakan dengan dikeluarkannya PP. RI. No. 17 tahun 1980. Wilayah Kota Padang diperluas dengan memasukkan sebagian wilayah dari Kabupaten Daerah Tingkat II Padang Pariaman yaitu : Pertama, Sebagian kecamatan Koto Tangah yang meliputi Nagari Koto Tangah dan Nanggalo, Kedua, Kecamatan Pauh yang meliputi Nagari Pauh IX, Nagari Pauh V, dan Limau Manis, dan Ketiga, Kecamatan Lubuk Begalung yang meliputi Nagari Nan XX, Lubuk Kilangan dan Bungus Teluk Kabung.

Berdasarkan PP. RI. No. 17 Tahun 1980 pasal 2 ayat 4 Wilayah Kecamatan Lubuk Begalung, berubah menjadi : Pertama, Sebagian Wilayah bekas Kecamatan

Lubuk Begalung yang terdiri dari Kampung/Nagari Nan XX menjadi Kecamatan Lubuk Begalung berkedudukan di Lubuk Begalung, Kedua, Sebagian Wilayah bekas Kecamatan Lubuk Begalung yang terdiri dari Kampung/Nagari Lubuk Kilangan menjadi Kecamatan Lubuk Kilangan berkedudukan di Indarung, dan Ketiga, Sebagian Wilayah bekas Kecamatan Lubuk Begalung yang terdiri dari Kampung/Nagari Bungus dan Teluk Kabung menjadi Kecamatan Bungus Teluk Kabung berkedudukan di Teluk Kabung

Bergabungnya Kecamatan Lubuk Kilangan menjadi bagian perluasan Kota Padang menyebabkan semua aset yang berada di Kecamatan Lubuk Kilangan diambil-alih oleh Kota Padang, salah-satunya Pasar Nagari Bandar Buat. Dikelolanya Pasar Bandar Buat oleh Pemerintah Kota Padang yaitu di bawah Dinas Pasar Kota Padang, menjadikan Pasar Bandar Buat sebagai pasar wilayah yang bertujuan membantu masyarakat Lubuk Kilangan untuk berdagang dan membeli barang sehingga tidak perlu lagi ke Pasar Pusat atau lebih dikenal dengan nama Pasar Raya Padang (Unayutas, 2016: 3).

Menurut Unayatus (2016), Pasar Bandar Buat pada awalnya merupakan pasar nagari yang didirikan di atas tanah kaum yang telah dihibahkan kepada nagari. Hari dan lokasi pasar ditetapkan berdasarkan kesepakatan yang diambil oleh nagari, sampai saat sekarang hari dan lokasi pasar ini tidak pernah berubah hanya bedanya dahulu pasar ini hanya buka dua sekali dalam sepekan yaitu hari Selasa dan hari Sabtu tapi sekarang pasar tersebut buka setiap harinya. Namun yang paling ramainya tetap pada hari balai tersebut.

Berpedoman pada sejarah berdirinya pasar nagari, Pasar Bandar Buat ini pertama sekali merupakan pasar yang dibangun dengan tujuan untuk dapat menampung hasil ladang dari masyarakat sekitar dan untuk menghidupkan suasana kekeluargaan di dalam masyarakat dengan cara mengunjungi pasar setiap hari pasar atau hari balai.

Pengambil-alihan pengelolaan pasar Bandar Buat oleh pemerintah Kota Padang tentunya akan melibatkan beberapa aktor penting yang berperan dalam proses penyerahan pengelolaan pasar Nagari Bandar Buat ke Pemerintah Kota Padang yang dahulunya dinamakan Kotamadya Padang. Selain keterlibatan aktor, pengambil-alihan pengelolaan pasar Nagari Bandar Buat juga akan menghasilkan kesepakatan dan perjanjian antara kedua belah pihak yaitu, pihak Nagari Lubuk Kilangan dan Pemerintah Kota Padang.

Pemerintah Kota Padang dengan Nagari Lubuk Kilangan telah menghasilkan kesepakatan terkait pengelolaan Pasar Bandar Buat yang sudah dalam pengelolaan Pemerintah Kota Padang. Kesepakatan ini terkait dengan pengelolaan pasar baik itu pembagian hasil pengelolaan pasar, investasi, pembebasan tanah, dan lain-lain. Namun pada kenyataannya kesepakatan yang telah dilakukan oleh Pemerintah Kota Padang dengan Nagari Lubuk Kilangan terhadap pengelolaan Pasar Nagari Bandar Buat tidak berjalan sesuai dengan kesepakatan yang telah ada. Hal ini kemudian memunculkan konflik antara Nagari Lubuk Kilangan dengan Pemerintah Kota Padang.

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan data Dinas Pasar Kota Padang tahun 2013 dan 2014, Kota Padang memiliki 16 pasar yang belum semuanya dikelola oleh Pemerintah kota Padang. Dari 16 pasar di Kota Padang, terdapat 8 pasar yang masih dikelola oleh masyarakat, dan sisanya sudah dikelola oleh Pemerintah Kota Padang termasuk didalamnya yaitu Pasar Bandar Buat.

Tabel 1.1
Pasar Menurut Lokasi Dan Pengelola 2014

No	Nama Pasar	Pengelola	Lokasi
1	Pasar Bandar Buat	Pemko Padang	Lubuk Kilangan
2	Pasar Indarung	Masyarakat	Lubuk Kilangan
3	Pasar Gaung	Masyarakat	Lubuk Begalung
4	Pasar Simpang Haru	Pemko Padang	Padang Timur
5	Pasar Raya	Pemko Padang	Padang Barat
6	Pasar Tanah Kongsu	Pemko Padang	Padang Barat
7	Pasar Pagi/Purus Atas	Masyarakat	Padang Barat
8	Pasar Ulak Karang	Pemko Padang	Padang Utara
9	Pasar Alai	Pemko Padang	Padang Utara
10	Pasar Siteba	Pemko Padang	Nanggalo
11	Pasar Belimbing	Masyarakat	Kuranji
12	Pasar Kampung Kalawi	Masyarakat	Kuranji
13	Pasar Lubuk Buaya	Pemko Padang	Kota Tengah
14	Pasar Simpang Tabing	Masyarakat	Kota Tengah
15	Pasar Balai Gadang	Masyarakat	Kota Tengah
16	Pasar Tarandam	Masyarakat	Padang Timur

Sumber: Dinas Pasar Kota Padang Tahun 2013 dan 2014

Pengelolaan pasar Bandar Buat oleh Pemerintah Kota Padang yang awalnya merupakan pasar milik Nagari Lubuk Kilangan, didasarkan pada kesepakatan antara KAN Lubuk Kilangan dengan Pemerintah Kota Padang. Berdasarkan hasil wawancara tanggal 14 maret 2017 dengan ketua KAN Lubuk kilangan sekarang, ada perjanjian antara pihak nagari Lubuk Kilangan dengan Pemerintah Kota Padang yang berkaitan dengan pembagian pendapatan atas pemindahan pengelolaan, yaitu 60% untuk Pemerintah Kota Padang dan 40% untuk Nagari Lubuk Kilangan, dan sampai sekarang perjanjian tersebut belum terlaksana dengan bukti Nagari Lubuk Kilangan sama sekali belum mendapatkan kompensasi dari hasil pengelolaan pasar tersebut.

Dalam menjalankan proses penyerahan pengelolaan pasar nagari Bandar Buat ke Pemerintah kota Padang, terdapat tim yang dibentuk oleh KAN Lubuk Kilangan yang berperan dalam proses penyerahan asar dari nagari ke Pemerintah Kota Padang pada tahun 1980. Informasi media massa Padang Ekspres tanggal 11 September 2017 menuliskan bahwa, pengelolaan dan revitalisasi pasar sangatlah penting diterapkan pada pasar-pasar nagari di Sumatera Barat. Anggota komisi II DPRD Sumbar asal Padang Pariaman, Komi Chaniago mengatakan, Kabupaten Padang Pariaman menjadikan pembenahan pasar nagari sebagai skala prioritas. Keberadaan pasar nagari sangat strategis untuk meningkatkan ekonomi masyarakat, oleh karena itu pasar tersebut harus memiliki fasilitas penunjang untuk kegiatan jual beli.

Dari latar belakang diatas, perumusan masalah yang dapat dijawab dari penelitian ini adalah “ Bagaimana Proses Penyerahan Pengelolaan Pasar Nagari Bandar Buat ke Pemerintah Kota Padang”.

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang telah diuraikan diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah :

1.3.1 Tujuan Umum

Mendeskripsikan proses penyerahan pengelolaan Pasar Nagari Bandar Buat ke Pemerintah Kota Padang.

1.3.2 Tujuan Khusus

1. Mendeskripsikan tahapan-tahapan penyerahan pengelolaan Pasar Nagari Bandar Buat ke Pemerintah Kota Padang.
2. Mendeskripsikan hasil kesepakatan antara aktor yang terlibat dengan Pemerintah Kota Padang.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Akademis

Penelitian ini dimanfaatkan sebagai pengembangan ilmu, sumbangan pemikiran bagi disiplin ilmu sosial terutama disiplin ilmu sosiologi dan sebagai sumbangan bahan referensi pada jurusan sosiologi.

1.4.2 Manfaat Praktis

1. Penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan bacaan dan diskusi pada Jurusan Sosiologi.

2. Kajian praktis dalam perubahan sosial yang terjadi di pasar Bandar Buat pasca dikelola Pemerintah Kota Padang.

1.5 Tinjauan Pustaka

1.5.1 Perspektif Sosiologis

Perspektif ini menggunakan teori konflik Ralf Dahrendorf. Teori konflik yang dikemukakan oleh Ralf Dahrendorf ini berasal dari penolakannya terhadap teori fungsionalisme struktural. Dahrendorf mengungkapkan bahwa masyarakat selalu mengikuti proses perubahan, dan konflik pertikaian turut memberikan andil dalam perubahan dan dis-integrasi. Mereka yang memiliki kekuasaan akan selalu berusaha untuk memaksa masyarakat untuk hidup teratur guna menjaga ketertiban dilingkungan masyarakat.

Teori konflik akan melihat konflik kepentingan dan ketidakserasian dalam tatanan masyarakat. Ralf Dahrendorf juga mengungkapkan bahwa, penyebaran otoritas yang tidak merata merupakan hal yang mendorong terciptanya konflik sosial yang sistematis. Otoritas yang dipegang oleh tiap golongan masyarakat memiliki kekuatan yang berbeda. Meski seseorang bisa memiliki kekuasaan di suatu bidang, namun orang yang sama belum tentu bisa menguasai bidang lain dalam konteks status sosial.

Di dalam setiap asosiasi, orang yang berada pada posisi dominan berupaya mempertahankan *status quo*, sedangkan orang yang berada pada posisi subordinat berupaya mengadakan perubahan. Konflik kepentingan di dalam asosiasi selalu ada sepanjang waktu, setidaknya yang tersembunyi. Ini berarti legitimasi otoritas selalu terancam (Ritzer, 2014: 150).

Kekuasaan atau otoritas mengandung dua unsur yaitu penguasa (orang yang berkuasa) dan orang yang dikuasai atau dengan kata lain atasan dan bawahan. Kelompok dibedakan atas tiga tipe antara lain: 1. Kelompok Semu (quasi group) 2. Kelompok Kepentingan (manifes) 3. Kelompok Konflik Kelompok semu adalah sejumlah pemegang posisi dengan kepentingan yang sama tetapi belum menyadari keberadaannya, dan kelompok ini juga termasuk dalam tipe kelompok kedua, yakni kelompok kepentingan dan karena kepentingan inilah melahirkan kelompok ketiga yakni kelompok konflik sosial. Sehingga dalam kelompok akan terdapat dalam dua perkumpulan yakni kelompok yang berkuasa (atasan) dan kelompok yang dibawah (bawahan). Kedua kelompok ini mempunyai kepentingan berbeda. Bahkan, menurut Ralf, mereka dipersatukan oleh kepentingan yang sama.

Dahrendorf mengakui pentingnya konflik mengacu dari pemikiran Lewis Coser dimana hubungan konflik dan perubahan ialah konflik berfungsi untuk menciptakan perubahan dan perkembangan. Jika konflik itu intensif, maka perubahan akan bersifat radikal, sebaliknya jika konflik berupa kekerasan, maka akan terjadi perubahan struktural secara tiba-tiba.

Biasanya, orang yang memiliki kekuasaan tidak ingin ada orang atau golongan lain yang merebut kekuasaan yang dimilikinya. Penguasa tersebut akan selalu berusaha mempertahankan status dan kekuasaannya agar tidak jatuh ke tangan orang lain. Hal ini yang melahirkan konflik, dimana jika tingkat intensitas konflik itu tinggi, maka akan terjadi perubahan yang radikal. Sedangkan jika sampai terjadi konflik yang menimbulkan kekerasan, maka akan terjadi perubahan struktur sosial mendadak.

Penggabungan kepentingan-kepentingan kelas subordinat dalam kebijaksanaan kelas yang berkuasa. Perubahan sistem sosial ini menyebabkan juga perubahan-perubahan lain di dalam masyarakat antara lain munculnya kelas, dekomposisi tenaga kerja, dan dekomposisi modal.

Analisis Dahrendorf berbeda dengan teori Marx, yang membagi masyarakat dalam kelas borjuis dan proletar sedangkan bagi Dahrendorf, terdiri atas kaum pemilik modal, kaum eksklusif dan tenaga kerja. Hal ini membuat perbedaan terhadap bentuk-bentuk konflik, dimana Dahrendorf menganggap bahwa bentuk konflik terjadi karena adanya kelompok yang berkuasa atau dominasi (domination) dan yang dikuasai (submission), maka jelas ada dua sistem kelas sosial yaitu mereka yang berperan serta dalam struktur kekuasaan melalui penguasaan dan mereka yang tidak berpartisipasi melalui penundukan.

1.5.2 Konsep Pasar

Pandangan Adam Smith melihat pasar sinonim dengan baik tempat jualan (market-place) maupun sebagai suatu daerah geografis. Kemudian Alfred Marshal melihat pasar suatu mekanisme dalam penciptaan harga. Pasar adalah sebuah institusi, tempat pertemuan antara penjual dan pembeli; suatu peristiwa yang berbentuk dan memiliki budaya yang khas yang melibatkan banyak orang dan tindakan serta hubungan sosial, yang membentang pada sejumlah tingkatan. Pasar merupakan salah satu penggerak dinamika kehidupan ekonomi. Berfungsinya lembaga pasar sebagai institusi ekonomi tidak terlepas dari aktivitas yang dilakukan oleh penjual dan pembeli (Damsar, 2002: 83)

Menurut Polanyi (dalam Damsar, 2002: 18), ekonomi pasar merupakan suatu sistem ekonomi yang dikontrol, diatur, dan diarahkan oleh pasar itu sendiri. Dimana pasar mengatur kehidupan sosial, termasuk ekonomi secara otomatis.

Sosiologi memandang pasar sebagai fenomena sosial yang kompleks dengan berbagai macam perangkatnya. Yang mana perangkat pasar terdiri atas adanya penjual, pembeli, penyalur, suplayer, distributor dan stakeholders. Pasar merupakan suatu struktur yang padat dengan jaringan sosial atau yang penuh dengan konflik persaingan (Damsar, 2005: 5). Pasar tidak hanya menyangkut aspek-aspek ekonomis proses jual beli barang saja, tetapi pasar adalah pranata ekonomi sekaligus juga cara hidup: suatu gaya umum dari kegiatan ekonomi yang mencapai segala aspek dari masyarakat dan suatu dunia sosial budaya yang nyaris lengkap dalam dirinya.

Terdapat enam ciri dan karakteristik pasar sebagai sebuah marketplace (Slater dan Tonkins, 2001: 9-13 dalam Yulianti, 2011: 21), yaitu:

1. Pasar sebagai tempat komunikasi: seperti komunikasi politik, sosial, religi, bahkan terminologi komersil.
2. Pasar sebagai sentralitas sosial.
3. Pasar sebagai kompleksitas hubungan *local-urban governance*.
4. Pasar sebagai hubungan kultural, identitas dan kekuasaan lokal, dimana masyarakat dengan mudah menyerap saling hubungan dan perubahan yang terjadi.
5. Pasar sebagai tempat yang mempunyai aturan tersendiri (*highly regulated*)

6. Pasar sebagai milik orang banyak atau umum (*publicness*), dimana setiap orang dapat akses kesana, tetapi sesuai dengan sumber daya yang dimiliki.

Berfungsinya lembaga pasar sebagai institusi ekonomi yang menggerakkan kehidupan ekonomi tidak terlepas dari aktivitas yang dilakukan oleh aktor-aktor pasar. Para ekonom mengasumsikan bahwa aktor pasar bertindak untuk mencapai kepentingan pribadinya sendiri, dalam isolasi dari setiap faktor-faktor budaya dan hubungan sosial yang ada.

Selain itu pasar juga dapat dilihat dari segi perebutan yang menimbulkan konflik dalam pasar itu sendiri. Timbulnya konflik tidak terlepas dari keberadaan manusia dalam kehidupan berkelompok yang dimanis dalam proses perubahan menuju perkembangan dan kejuaan. Menurut Dahrendorf (Ritzer, 2003: 30) konflik muncul karena adanya pembagian kekuasaan dan penyebaran sumber daya yang tidak merata, akibat timbul kesenjangan antara yang memiliki otoritas dengan mereka yang tidak memiliki otoritas serta kesenjangan dalam memperoleh sumber daya alam. Ketika kesenjangan ini muncul maka terjadilah konflik.

Dalam konteks sosiologi pasar, perangkat pasar terdiri atas adanya aktor, distribusi dan konsumsi. Aktor adalah mereka yang terlibat dalam pasar. Aktor tersebut adalah, pedagang, pembeli, pengelola pasar (UPTD).

1.5.2 Konsep Nagari

Menurut Jendrius (2017), Minangkabau merupakan masyarakat matrilineal terbesar di dunia dan mayoritas beragama Islam. Di Minangkabau nagari dikenal dengan istilah dari bahasa Sanskerta yaitu *nagara* (Rajab, 1969: 12 dalam Abbas,

2003: 7). Dalam tambo diceritakan pertalian antar nagari yaitu dari Nagari Pariangan di Kabupaten Tana Datar, dan mitologi Datuak Katumanggungan dan Datuak Perpatih Nan Sabatang yang mewakili dua keselarasan. (dalam Abbas, 2003: 7).

Nagari dipimpin kepala nagari (biasanya *primus inter pares*). Tidak ada kaitan antara satu nagari dengan nagari lainnya, jadi setiap nagari berdiri sendiri sehingga disebut republik kecil (Naim, 1979: 16 dalam Abbas, 2003: 7). Begitu otonomnya nagari sehingga berlaku “*adat salinka nagari*” (adat selingkar nagari), maksudnya, ketentuan adat satu nagari hanya berlakupada nagari itu saja.

Menurut Sjahmunir (2006), Setelah Indonesia merdeka tanggal 17 Agustus 1945, di daerah Sumatera Barat pemerintah terendah langsung di bawah camat adalah Pemerintah Nagari yang dipimpin oleh Wali Nagari. Seiring dengan berjalannya waktu, Pemerintahan Nagari di Sumatera Barat kemudian diatur dalam peraturan pemerintah dan mengalami banyak perubahan dari tahun ke tahun.

Pengaturan Pemerintah Nagari di Sumatera Barat tersebut terdiri dari:

1. Maklumat Residen No. 20-21 Tahun 1946.
2. Surat Keputusan Gubernur No.50/GP/1950
3. Surat Keputusan Gubernur No.02/Desa/GSB/1962
4. Surat Keputusan Gubernur No.15/GSB/1968
5. Surat Keputusan Gubernur o.155/GSB/1974

Peraturan-peraturan ini membahas mengenai pelaksanaan sistem kekuasaan yang dilakukan oleh Pemerintahan Nagari di Sumatera Barat.

Nagari memiliki fungsi dan wewenang penting bagi masyarakat setempat dan bagi pemerintah pusat, provinsi, dan juga kabupaten. Berdasarkan peraturan dari otoritas, nagari memiliki:

1. Urusan pemerintahan berdasarkan asal-usul dari hak nagari.
2. Urusan pemerintahan daerahnya diberikan kewenangan kepada nagari untuk mengatur.
3. Mewakili tugas dari pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan atau pemerintah kabupaten
4. Tugas pemerintahan lainnya yang mengacu pada konstitusi diserahkan kepada nagari (Jendrius, 2017: 91-92).

Suatu nagari mensyaratkan 8 hal, salah satu di antaranya pasar yang telah ada sejak awal nagari. Dalam pengelolaan sumber daya nagari penghulu berperan dan berak mengaturnya.

Dalam sebuah nagari, terdapat pasar yang dibuat oleh kaum atau masyarakat nagari yang berfungsi menampung hasil bumi masyarakat nagari. Pasar nagari berperan penting sebagai wadah perekonomian masyarakat (Abbas, 2003: 7). Selain menampung hasil bumi dari masyarakat, konteks sosiologi dari pasar nagari dahulunya adalah sebagai tempat berinteraksi dan menjadi tempat adanya pengumuman-pengumuman yang dilakukan oleh nagari.

1.5.4. Penelitian Relevan

Penelitian tentang pasar nagari sudah pernah dikaji sebelumnya oleh peneliti lainnya, diantaranya yang dilakukan oleh *Sari (2009) dengan judul Proses Sosial Antara Stakeholders dalam Pelaksanaan Revitalisasi Pasar Bandar Buat*, dalam

penelitian ini Ridna Sari menjelaskan mengenai Revitalisasi pasar merupakan sebuah upaya peremajaan pasar tradisional menjadi pasar semi modern tanpa menghilangkan sistem tawar menawar didalamnya dan Pasar Bandar Buat salah satu contohnya. Proses sosial yang terjadi dalam pelaksana revitalisasi Pasar Bandar Buat merupakan proses sosial yang ditunjukkan oleh *stakeholders*, Dimana proses sosial ini dibagi atas dua bentuk yaitu proses sosial yang bersifat asosiatif dan proses sosial yang bersifat disosiatif. Dalam perencanaan revitalisasi terdapat proses asosiatif yang didalamnya mengandung unsur kerjasama sehingga terjalin kesepakatan di antara *stakeholders*

Sedangkan proses sosial disosiatif ini adalah ketidaksesuaian antara perjanjian dengan pelaksanaan. Ketidaksesuaian *disosiatif* ini lebih disebabkan oleh pemerintah kota dengan pihak investor. Hal ini dari pelaksanaan revitalisasi pasar yang tidak berjalan sebagaimana kontrak kerjasama yang telah mereka sepakati tersebut. Masalahnya antara lain ketidak sesuaian *disosiatif* jangka waktu pelaksanaan pembangunan, pengaturan keuangan yang kurang akurat, sistem pengawasan pembangunan yang tidak sesuai dengan kontrak da pembagian keuntungan pasar yang tidak diberikan tepat waktu antara Dinas Pasar dan Investor dan antara Dinas Pasar dengan KAN (tokoh masyarakat). Akibat dari masala diatas adalah akibat-akibat yang muncul. Pertama, pembangunan pasar terbengkalai sampai saat sekarang. Kedua, banyak hutang yang ditimbulkan oleh pihak investor. Ketiga, ketidaknyamanan dalam pelaksanaan pembangunan yang ditimbulkan oleh masyarakat setempat dan keempat muncul komentar-komentar miring Dinas Pasar dan KAN (tokoh masyarakat) terhadap investor.

Yulianti (2011) dengan judul Dampak Perubahan Lokasi Pasar Terhadap Sosial Ekonomi Masyarakat Di Nagari Muaralabuh Kecamatan Sungai Pagu Kabupaten Solok Selatan, dalam penelitian ini, Nella Yuluanti menjelaskan mengenai upaya pemerintah Kabupaten Solok Selatan mejadikan pasar Nagari Muaralabuh menjadi pasar yang layak, maka dipindahkan lokasi pasar sesuai dengan instruksi Bupati Solok Selatan Nomor 510,516.249 tahun 2009. Lokasi pasar lama tidak layak lagi diukur dari ketertiban, kebersiha dan keindahan. Dari hasil observasi, pasar lama sudah tidak mampu menampung pedang dan pembeli yang semakin hari semakin banya, sehingga terjadi kemacetan terutama pada hari pasar. Selain itu lokasi pasar sempit dan terbatas dengan luas 2Ha dan dikelilingi oleh pemukima, pendidikan dan perkantoran. Alasan pemerintah melakukan pemindahan lokasi pasar dilihat pada alasan sosial, alasan ekonomi dan alasan tata lokasi. Pada alasan sosial, perpindahan lokasi pasar membuat hubungan sosial antara pedagang dan pembeli tidak begitu akrab lagi. Sehingga baik itu sesama pedagang dengan pelanggan ubungan sosial mereka. Sebab perubahan dan pengaturan pengelompokan terhadap pedagang terjadi pada lokasi pasar baru. Alasan ekonomi, perpindahan lokasi pasar membuat dari sebagian pedagang yang mengalami penurunan pendapatannya dan ada dari pedagang yang pendapatannya meningkat. Seperti masyarakat dilokasi pasar lama, mereka mengalami penurunan pendapatan karena pengunjung tidak lagi berbelanja di lokasi pasar lama, mereka lebih ke lokasi pasar baru. Alasan tata lokasi perpindahan lokasi pasar merupakan suatu bentuk upaya pemerintah Kabupaten Solok Selatan dalam memperindah tata

letak, lokasi pasar dan wilayah Nagari Muaralabuh yang mana luas lokasi pasar lama hanya 2Ha sedangkan lokasi pasar baru 7Ha.

Unayatus (2016) Perkembangan Pasar Bandar Buat 1984-2015, dalam penelitian ini, Nial Ranov Unayatus menjelaskan tentang perkembangan yang terjadi di Pasar Bandar Buat, yang mana perkembangan ini juga dipengaruhi oleh perubahan-perubahan yang terjadi di Kecamatan Lubuk Kilangan, baik itu dalam pemerintahan dan pembangunan. Peraturan Pemerintah No. 17 Tahun 1980 Tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang, membuat Kenagarian Lubuk Kilangan yang tergabung dalam wilayah Kabupaten Padang Pariaman menjadi sebuah Kecamatan dibawah wilayah Kota Padang.

Penggabungan daerah Lubuk Kilangan ke dalam Kota Padang memberikan pengaruh besar bagi perkembangan Pasar Bandar Buat. Pasar Bandar Buat sebelum terjadi pemekaran yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Padang merupakan sebuah pasar nagari yang dikelola oleh Kenagarian Lubuk Kilangan. Pada masa kenagarian ini Pasar Bandar Buat hanya beroperasi dua kali dalam seminggu yaitu pada hari Selasa dan Sabtu, dengan bentuk bangunan berupa los besar semi-permanen. Setelah dikelola oleh Dinas Pasar Kota Padang di bawah Unit Pengelola Teknis Daerah (UPTD) Pasar Bandar Buat, Pasar Bandar Buat beroperasi setiap hari dengan bentuk bangunan permanen.

Perkembangan Pasar Bandar Buat tidak hanya dipengaruhi oleh perubahan sistem pengelolaan tetapi juga karena kebijakan pembangunan yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Padang terhadap kawasan Bandar Buat yaitu dengan diprioritaskan wilayah Bandar Buat sebagai kawasan pemukiman perumahan untuk

masyarakat Kota Padang dan sekitarnya yang ingin tinggal menetap di Kota Padang. Berdasarkan dari semua perubahan-perubahan yang diterapkan oleh Pemerintah Kota Padang terhadap Kelurahan Bandar Buat, membuat Pasar Bandar Buat dari tahun ke tahun mengalami peningkatan, baik itu dalam jumlah pedagang maupun pengunjung. Selain itu, Pasar Bandar Buat juga menjadi pusat perekonomian bagi masyarakat Kecamatan Lubuk Kilangan.

Perubahan-perubahan yang terjadi di Kelurahan Bandar Buat serta perkembangan Pasar Bandar Buat dari pasar nagari menjadi pasar wilayah, memberikan dampak terhadap masyarakat Kelurahan Bandar Buat dan sekitarnya. Perubahan ini dapat dilihat dari sektor pembangunan fisik dan sosial-ekonomi. Perubahan pada pembangunan fisik di Kelurahan Bandar Buat dapat dilihat dari banyaknya pembangunan kompleks perumahan baru di Kelurahan Bandar Buat dan pembangunan terhadap Pasar Bandar Buat. Untuk sektor sosial-ekonomi terjadinya perubahan mata pencaharian masyarakat Kelurahan Bandar Buat dan sekitarnya dari berprofesi sebagai petani menjadi pedagang dan juga memunculkan mata pencaharian baru seperti penyewaan toko atau kios, kuli angkat, tukang parkir, tukang ojek dan juga sebagai keamanan di Pasar Bandar Buat.

1.6 Metodologi Penelitian

1.6.1 Metode Penelitian Dan Tipe Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian ilmu-ilmu sosial yang mengumpulkan dan menganalisis data berupa kata-kata (lisan maupun tulisan) dan perbuatan-perbuatan manusia serta peneliti tidak berusaha menghitung atau mengkuantifikasikan data

kualitatif yang telah diperoleh dan demikian tidak menganalisis angka-angka (Afrizal, 2014: 13)

Menurut Bodgan dan Taylor (dalam Moleong, 2013: 4) pendekatan kualitatif diarahkan pada latar belakang individu tersebut secara holistik (utuh). Dalam hal ini tidak boleh mengisolasi individu atau organisasi ke dalam variabel atau hipotesis, tetapi perlu memandangnya sebagai bagian dari sesuatu keutuhan.

Metode penelitian kualitatif berguna untuk pemahaman yang lebih mendalam tentang makna (arti subjektif dan penafsiran) dan konteks tingkah laku serta proses yang terjadi pada faktor-faktor yang berkaitan dengan tingkah laku tersebut (Bullock dkk., 2005: 117 dalam Afrizal, 2014: 38).

Afrizal (2014) menambahkan, metode penelitian kualitatif berguna untuk mengetahui realitas sosial dari sudut pandang aktor. Mengetahui sesuatu dari sudut pandang aktor tentunya sangat bermanfaat untuk mengembangkan sesuatu yang sesuai dengan aspirasi dan pengetahuan lokal atau kelompok sasaran (Afrizal, 2014: 39).

Metode penelitian kualitatif ini digunakan untuk mendeskripsikan mengenai proses penyerahan pengelolaan pasar nagari Bandar Buat ke Pemerintah Kota Padang. Sesuai dengan penjelasan di atas, dibutuhkan data berupa kata-kata dari informan atau aktor-aktor yang terlibat dalam hal penyerahan pasar nagari Bandar buat ke Pemerintah Kota Padang.

Sementara itu, tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah tipe penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif merupakan penelitian yang

mendeskripsikan suatu fenomena atau kenyataan sosial berkenaan dengan masalah dan unit yang diteliti. Penggunaan metode ini akan memberikan peluang kepada peneliti untuk mengumpulkan data yang bersumber dari wawancara, catatan lapangan, foto-foto, dokumen pribadi, catatan atau memo dan dokumen resmi guna menggambarkan subyek penelitian (Moleong, 2013: 11)

1.6.2 Informan Penelitian

Informan adalah orang yang dimanfaatkan untuk memberikan informasi tentang situasi dan kondisi latar penelitian, ia harus mempunyai banyak pengalaman tentang latar penelitian. Informan secara sukarela menjadi anggota tim penelitian walaupun hanya bersifat informal (Moleong, 2013: 132).

Informan juga diartikan sebagai orang-orang yang memberikan informasi baik tentang dirinya maupun orang lain atau suatu kejadian. Informan haruslah dipandang sebagai sumber informasi dan pengetahuan bagi peneliti, baik sumber informasi tentang dirinya, tentang orang lain atau tentang kejadian-kejadian (Afrizal: 2014, 139-140).

Afrizal (2014:139) menambahkan pengertian informan penelitian yaitu orang yang memberikan informasi baik tentang dirinya maupun orang lain atau suatu kejadian atau suatu hal kepada peneliti atau pewawancara mendalam.

Ada dua kategori informan menurut Afrizal (2014 : 139), diantaranya :

1. Informan Pelaku, yaitu informan yang memberikan keterangan tentang dirinya, tentang perbuatannya, tentang pikirannya, tentang interpretasinya (maknanya) atau tentang pengetahuannya. Mereka adalah subjek dari penelitian itu sendiri. Pada penelitian ini, yang menjadi informan pelaku

adalah KAN Lubuk Kilangan dan Pemerintah Kota Padang karena terlibat dalam proses penyerahan pengelolaan Pasar Nagari Bandar Buat.

2. Informan Pengamat, yaitu informan yang memberikan informasi tentang orang lain atau suatu kejadian atau suatu hal kepada peneliti. Informan kategori ini dapat orang yang tidak diteliti dengan kata lain orang lain yang mengetahui orang yang kita teliti atau agen kejadian yang diteliti. Mereka disebut sebagai saksi suatu kejadian atau pengamat lokal. Dalam berbagai literatur mereka ini disebut pula sebagai informan kunci. Pada penelitian ini, yang menjadi Informan pengamat adalah pedagang yang menggunakan fasilitas pada Pasar Bandar Buat.

Informan ini didapat melalui metode *purposive sampling*. *Purposive sampling* adalah pemilihan informan telah ditentukan terlebih dahulu. Teknik *purposive sampling* (pemilihan informan secara sengaja) yaitu peneliti menetapkan kriteria tertentu yang mesti dipenuhi oleh orang yang akan dijadikan sumber informasi. Berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan, peneliti telah mengetahui identitas orang-orang yang akan dijadikan informan penelitiannya sebelum penelitian dilakukan.

Pada awalnya penelitian ini menggunakan metode *purposive sampling*, untuk mendapatkan informan dengan kriteria yang ditentukan adalah:

1. Anggota tim penyerahan aset dari nagari ke Pemerintah Kota Padang
2. Pengurus Kerapatan Adat Nagari (KAN)
3. Pengurus Pasar
4. Dinas Pasar Kota Padang

5. Niniak Mamak
6. Orang Tua di Nagari Lubuk Kilangan

Namun pada saat peneliti turun lapangan, informan penelitian yang awalnya menggunakan metode *purposive sampling*, berubah menjadi *snowballing* atau mekanisme gelinding bola salju. Metode *snowballing* adalah informan-informan penelitian diperoleh di lapangan berdasarkan informasi yang diperoleh dari para informan, bukan berdasarkan kriteria yang ditetapkan oleh peneliti (Afrizal, 2014: 141).

Perubahan ini terjadi karena peneliti mendapat arahan dan saran dari iniforman pertama yang dianggap lebih mengetahui mengenai permasalahan yang diangkat oleh peneliti. Pada awalnya peneliti mewawancarai ketua KAN Lubuk Kilangan H. Basri, kemudian beliau memberi saran untuk mewawancarai mantan sekretaris KAN Lubuk Kilangan yaitu Sabirin, Datuak Sampono, dengan alasan lebih mengetahui permasalahan yang diteliti.

Setelah melakukan wawancara dengan beliau, informan menanyakan kembali kepada siapa harus bertanya mengenai permasalahan yang sedang diteliti tersebut. Sabirin kemudian memberi rekomendasi untuk mewawancarai Mizwar Jambak dan H. Sofyan, karna mereka saat ini terlibat dalam permasalahan mengenai Pasar Bandar Buat.

Penggunanaa metode *snowballing* diterapkan pada pengambilan data yang berasal dari Nagari Lubuk Kilangan. Namun untuk data yang berasal dari

Pemerintah Kota Padang, peneliti kembali menggunakan metode *purposive sampling*.

Tabel 1.2
Informan Penelitian

No.	Jenis Informan	Nama	Pekerjaan
I	Informan Pelaku	Pihak Nagari Lubuk Kilangan	
1		H. Basri	Ketua KAN Lubuk Kilangan
2		Sabirin, Datuak Sampono	Mantan Sekretaris KAN Lubuk Kilangan tahun 1986-2007
3		H. Sofyan, Datuak Rajo Bujang	Sekretaris Tim Pengelolaan dan Pengembangan Pasar Bandar Buat
4		Mizwar Jambak, SH	Ketua Tim Terpadu Pasar Bandar Buat
5		Nusran, Datuak Rajo Nan Putihah	Bendahara KAN Lubuk Kilangan
II		Pihak Pemerintah Kota Padang	
6		Jasman	Sekretaris Dinas Perdagangan Kota Padang
7		Hamdani	Kepala UPTD Pasar Bandar Buat
8		Reno Saputra	Petugas Restribusi Harian
III	Informan Pengamat	Pihak Pengguna Jasa Pasar	
9		Upik	Pedagang Kaki Lima Pasar Bandar Buat
10		Dasmawerni	Pedagang Meja Batu Pasar Bandar Buat
11		Eli	Pedagang Meja Batu Pasar Bandar Buat
12		H. Syamsir	Pedagang Toko Pasar Bandar Buat
13		Nurhayati	Pedagang Meja Batu Pasar Bandar Buat
14		Jus	Pedagang Meja Batu Pasar Bandar Buat
15		Don	Petugas Parkir

Sumber : Data Primer Tahun 2018

Jumlah informan pada penelitian ini adalah 15 orang, diantaranya 5 orang dari pihak Nagari Lubuk Kilangan, yang berdasarkan informasi di lapangan mengetahui mengenai permasalahan yang diteliti. Kemudian 3 orang dari Pemerintah Kota Padang, karena terlibat dengan kesepakatan dengan pihak Nagari Lubuk Kilangan, 6 orang dari pedagang Pasar Bandar Buat yang memanfaatkan fasilitas dari hasil Pengelolaan Pasar Bandar Buat, dan 1 orang petugas parkir.

Setelah data yang didapat telah mencapai validitas, proses pengambilan informasi dan informan pun dihentikan. Ini dikarenakan jumlah informan telah mencapai tingkat kejenuhan data dan pertanyaan-pertanyaan penelitian telah terjawab sepenuhnya oleh informan.

1.6.3 Data Yang Diambil

Dalam penelitian, untuk mendapatkan data atau informasi maka data yang dikumpulkan adalah data primer dan sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh di lapangan saat proses penelitian berlangsung dan data ini diambil melalui observasi dan wawancara mendalam. Data yang diambil melalui observasi dan wawancara mendalam ini adalah mengenai tahapan-tahapan penyerahan pasar nagari Bandar Buat ke Pemerintah Kota Padang, dan kemudian hasil kesepakatan antara aktor yang terlibat dengan Pemerintah Kota Padang

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari media yang dapat mendukung dan relevan dengan penelitian ini, serta dapat diperoleh dari studi kepustakaan, dokumentasi, data statistik, foto-foto, literatur-literatur hasil penelitian dan artikel. Data ini berupa buku-buku, laporan, hasil penelitian atau dokumen yang relevan dan sama dengan penelitian ini.

Data sekunder dalam bentuk dokumen tertulis:

1. Lembar Negara Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 1980 Tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang.
2. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1980 Tentang Bantuan Kredit Pembangunan Dan Pemugaran Pasar Tahun 1980/1981
3. Peraturan Kotamadya Daerah Tingkat II Padang Nomor: 17/PD/1984 Tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pasar Pemerintahan Kotamadya tingkat II Padang.
4. Kesepakatan Bersama Pemerintah Kota Padang dengan KAN Lubuk Kilangan, tertanggal 11 Mei 2006 yang didapat dari Kantor Dinas Perdagangan Kota Padang
5. Surat Perjanjian Kerja Sama antara Pemerintah Kota Padang dengan PT. Syafindo Mutiara Andalas, tertanggal 11 Mei 2006 yang didapat dari informan pihak Nagari Lubuk Kilangan.
6. Notulen Rapat Evaluasi Hasil Temuan Lapangan Pelaksanaan Pembangunan Pasar Bandar Buat, tertanggal 30 Mei 2011 yang didapat dari informan pihak Nagari Lubuk Kilangan.

Semua dokumen tertulis tersebut dapat dilihat pada halaman lampiran.

1.6.4 Metode Pengumpulan Data

Menurut Lofland dan Lofland (1948: 47) sumber data utama dalam penelitian kualitatif adalah kata-kata dan tindakan, selebihnya adalah kata-kata tambahan seperti dokumen dan lain-lain. Kata-kata dan tindakan orang diamati atau diwawancarai merupakan data utama yang nantinya akan dicatat melalui catatan

tertulis atau melalui rekaman video atau audio dan pengambilan foto atau film (Moleong, 2013: 157).

Metode pengumpulan data dilakukan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan metode observasi, wawancara mendalam, dan studi dokumen.

1. Observasi

Observasi adalah pengamatan secara langsung pada objek yang diteliti dengan menggunakan panca indra. Dengan observasi kita dapat melihat, mendengar dan merasakan apa yang sebenarnya terjadi. Metode observasi bertujuan untuk mendapatkan data yang dapat menjelaskan atau menjawab permasalahan penelitian.

Observasi digunakan sebagai metode utama selain wawancara mendalam. Pertimbangan digunakannya metode observasi ini adalah, bahwa apa yang orang katakan sering kali berbeda dengan apa yang orang itu lakukan (Radlia, 2014: 28).

Data observasi berupa data faktual, cermat dan terperinci tentang keadaan lapangan, observasi yang digunakan adalah *participant as observer* yaitu peneliti memberitahu maksud dan tujuan pada kelompok yang diteliti (Ritzer, 2003:74). Observasi adalah metode yang digunakan untuk memperoleh data lapangan dengan cara langsung ke lokasi penelitian. Dengan observasi peneliti dapat melihat dan mengetahui bentuk Pasar Bandar Buat setelah dikelola oleh Pemerintah Kota Padang.

Dalam metode penelitian ini, peneliti mengamati realitas dan memberitahu maksud dan tujuan kepada kelompok yang diteliti mengenai proses penyerahan pengelolaan Pasar Nagari Bandar Buat ke Pemerintah Kota Padang.

Data dari hasil observasi penelitian di lapangan yaitu Pemerintah Kota Padang telah melakukan pengelolaan terhadap Pasar Bandar Buat, pengelolaan tersebut diantaranya pembangunan lantai 2, toko/kios, hingga pengelolaan redistribusi dan keamanan di Pasar Bandar Buat.

Pada pembangunan Pasar Bandar Buat, bisa dikatakan belum selesai dan belum sesuai dengan apa yang direncanakan oleh Pemerintah Kota Padang melalui pihak investor. Pada lantai 2 Pasar Bandar Buat, terdapat meja-meja batu yang digunakan pedagang untuk berjualan. Selain itu, juga terdapat pedagang-pedagang kaki lima yang berjualan di koridor lantai 2 Pasar Bandar Buat. Koridor ini sebetulnya merupakan akses jalan bagi pengunjung maupun pedagang di Pasar Bandar Buat dan tidak diperbolehkan untuk berjualan atau meletakkan barang dagangannya di tempat tersebut.

Pihak investor dalam hal ini merupakan pelaksana pembangunan Pasar Bandar Buat diharuskan membebaskan tanah seluas 2000 M² yang terletak dibelakang pasar. Tanah tersebut terlihat berupa petak-petak persawahan yang masih ditanami padi oleh masyarakat pemilik tanah.

Pedagang Pasar Bandar Buat dikenakan biaya redistribusi baik itu redistribusi harian, redistribusi bulanan, hingga uang keamanan. Pengambilan redistribusi harian dan bulanan dilakukan oleh petugas dari UPTD Pasar Bandar Buat yang dilakukan dengan cara mendatangi setiap pedagang yang sedang berjualan di Pasar Bandar Buat tersebut. Berbeda dengan redistribusi harian dan bulanan, untuk uang keamanan Pasar Bandar Buat, petugas yang menarik redistribusi ini adalah pemuda yang mengatasnamakan Pemuda Pasar Bandar Buat. Sama halnya dengan petugas UPTD

Pasar Buat, pemuda ini juga mendatangi setiap pedagang untuk dimintai uang keamanan Pasar Bandar Buat.

Pedagang Pasar Bandar Buat yang dahulu berjualan di bawah dengan menggunakan payung-payung dan kios-kios dari kayu, sudah dipindahkan dan menempati setiap meja batu yang telah disediakan oleh Pemerintah Kota Padang, maka tempat yang sebelumnya dimanfaatkan pedagang sebagai tempat berjualan oleh di Pasar Bandar Buat, telah dijadikan lahan parkir baik itu untuk kendaraan roda 2 maupun roda 4.



Gambar 1.1 Lahan Parkir Pasar Bandar Buat

Sumber: Dokumentasi Pribadi, 24 Februari 2018

2. Wawancara Mendalam

Wawancara mendalam adalah suatu wawancara tanpa alternatif pilihan jawaban dan dilakukan untuk mendalami informasi dari seorang informan. Taylor (1984: 77) menambahkan, wawancara mendalam perlu dilakukan berulang-ulang kali antara pewawancara dengan informan (Afrizal: 2014, 136).

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (interviewer) yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara (interviewee) yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu. Maksud mengadakan wawancara, seperti seperti ditegaskan oleh Lincoln dan Guba (1985:266), antara lain untuk mengkonstruksi mengenai orang, kejadian, organisasi, perasaan, motivasi, tuntutan, kepedulian dan lain-lain (Moleong, 2013: 186)

Sebagai sebuah interaksi sosial, situasi wawancara antara peneliti dengan informannya mempengaruhi kualitas hasil wawancara mendalam atau kualitas data yang diperoleh (Afrizal, 2014: 137), maka dari itu proses wawancara di lapangan dilakukan pada saat informan tidak dalam keadaan sibuk beraktifitas.

Proses wawancara di lapangan dilakukan pada saat informan tidak dalam keadaan sibuk dalam keseharian. Wawancara dilakukan secara informal, yaitu saat pada saat melakukan wawancara hanya ada peneliti dan informan, dengan demikian informan dapat memberikan informasi atau data yang peneliti butuhkan tanpa dipengaruhi oleh orang lain. Sebelum melakukan wawancara, peneliti memperkenalkan diri dan menyampaikan judul penelitian kepada informan yang bersangkutan.

Wawancara terhadap informan diawali dengan menanyakan hal-hal yang bersifat umum seperti mengenai kehidupan informan, setelah mengetahui data dari informan, peneliti kemudian melanjutkan dengan mengajukan pertanyaan kepada informan terkait dengan penelitian yang dilakukan. Pedoman wawancara disusun terlebih dahulu sebelum peneliti terjun ke lokasi penelitian. Pedoman wawancara

ini mengenai pokok-pokok pertanyaan berdasarkan tujuan penelitian yaitu bagaimana proses penyerahan pengelolaan Pasar Nagari Bandar Buat ke Pemerintah Kota Padang.

Dalam proses wawancara, peneliti menggunakan alat bantu berupa *block note*, alat tulis, dan *smartphone*. Peneliti merekam dan mencatat secara ringkas hasil wawancara yang dilakukan. Kemudian setelah sampai dirumah, peneliti mencatat ulang hasil wawancara dengan membuat catatan lapangan berdasarkan hasil dari rekaman menggunakan *smartphone* dan catatan ringkas wawancara.

3. Studi Dokumen

Menurut Guba dan Lincoln (1981:228) dokumen ialah setiap bahan tertulis ataupun film, lain dari *record*, yang tidak dipersiapkan karena adanya permintaan seorang penyidik (Moleong, 2013: 216).

Dokumen adalah rekaman peristiwa yang lebih dekat dengan percakapan, menyangkut persoalan pribadi, dan memerlukan interpretasi yang berhubungan sangat dekat dengan konteks rekaman peristiwa tersebut (Bungin, 2001: 142-143).

Peneliti mengumpulkan dokumen-dokumen resmi yang berkaitan dengan proses penyerahan pasar nagari Bandar Buat ke Pemerintah Kota Padang, dokumen resmi terbagi atas dokumen internal dan dokumen eksternal. Dokumen internal berupa memo, pengumuman, instruksi, aturan suatu lembaga masyarakat tertentu yang digunakan dalam kalangan sendiri. Termasuk di dalamnya risalah atau laporan rapat, keputusan pemimpin kantor, dan semacamnya.

Dokumen eksternal berisi bahan-bahan informasi yang dihasilkan oleh suatu lembaga sosial, misalnya majalah, buletin, pernyataan, dan berita yang

disiarkan kepada media massa. Dokumen sosial dapat dimanfaatkan untuk menelaah konteks sosial, kepemimpinan, dan lain-lain (Moleong, 2013, 219).

1.6.5 Unit Analisis

Unit analisis adalah sesuatu yang berkaitan dengan fokus dan komponen yang telah diteliti, berupa individu, kelompok, organisasi, benda, wilayah dan waktu tertentu sesuai dengan fokus permasalahan. Sesuai dengan fokus penelitian ini, yang menjadi unit analisisnya adalah kelompok dengan kriteria yang telah ditentukan, yaitu aktor yang terlibat dalam proses penyerahan pasar Nagari Bandar Buat ke Pemerintah Kota Padang. Aktor tersebut mewakili Pasar Nagari dan Dinas dari instansi terkait proses penyerahan pasar nagari.

1.6.6 Analisis data

Analisis data dalam penelitian kualitatif didefinisikan sebagai suatu proses yang sistematis untuk menentukan bagian-bagian dan saling berkaitan antara bagian-bagian dan keseluruhan dari data yang telah dikumpulkan untuk menghasilkan klasifikasi atau tipologi. Aktivitas-aktivitas seorang peneliti dalam menganalisis data dalam penelitian kualitatif, dengan demikian, adalah menentukan data penting, menginterpretasikan, mengelompokkan ke dalam kelompok-kelompok tertentu dan mencari hubungan antara kelompok-kelompok (Afrizal, 2014: 175-176).

Pada penelitian ini, analisis data yang digunakan adalah gagasan analisis data oleh Afrizal yaitu sebuah teknik analisis data gabungan yang melengkapi analisis data dari Miles dan Huberman dengan Spradley dan Yin. Analisis data ini terdiri dari lima tahapan, secara ringkas sebagai berikut :

1. **Langkah Pertama** : Menyediakan catatan lengkap hasil wawancara mendalam atau observasi, membaca cepat, kemudian memberi simbol pada kata-kata penting.
2. **Langkah Kedua** : Menginterpretasikan atau mengkategorikan penggalan kata-kata penting yang sudah diberi simbol tadi. Selanjutnya, membangun sub-sub kategori.
3. **Langkah Ketiga** : Menghubungkan satu sama lain kata-kata yang sudah diberi simbol dan menyajikannya dalam bentuk matrik.
4. **Langkah Keempat** : Membangun asumsi dari data yang sudah dihubungkan dan disajikan dalam bentuk matrik. Ini berguna untuk membantu peneliti dalam memverifikasi asumsi-asumsi yang telah dibangun.
5. **Langkah Kelima** : Menguji keabsahan asumsi yang telah diverifikasi berdasarkan data yang telah terkumpul dengan melakukan lagi wawancara mendalam, observasi atau mengumpulkan data. Setelah itu, langkah yang dilakukan kembali merujuk lagi pada langkah nomor 2. Peneliti dapat membangun asumsi pada bagian ini dan melanjutkannya lagi ke langkah nomor 4. Peneliti dapat melakukan langkah-langkah analisis data di atas berulang kali sampai dia yakin bahwa datanya sudah cukup untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan penelitiannya dan dia yakin pula bahwa datanya sudah valid (Afrizal, 2014:185-187).

1.6.7 Proses Penelitian

Sebelum melakukan penelitian, penulis terlebih dahulu mengurus surat izin turun lapangan dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) untuk KESBANGPOL (Kesatuan Bangsa dan Politik) Kota Padang yang berlokasi di Kantor Walikota Padang Jalan Bypass Aia Pacah. Peneliti mendatangi KESBANGPOL Padang dan mendapatkan surat rekomendasi penelitian yang akan ditujukan kepada Dinas Perdagangan Kota Padang, Kantor Camat Lubuk Kilangan, UPTD Pasar Bandar Buat, dan KAN Lubuk Kilangan. Surat izin dari KESBANGPOL Pemerintah Kota Padang ini digunakan untuk meminta data terkait dengan penelitian proses penyerahan pengelolaan Pasar Nagari Bandar Buat ke Pemerintah Kota Padang.

Pertama kali peneliti mendatangi Kantor KAN Lubuk Kilangan dengan bermaksud menemui ketua KAN Lubuk Kilangan. Peneliti bertemu dengan sekretaris KAN Lubuk Kilangan dan menanyakan keberadaan ketua KAN pada saat itu, sekretaris KAN mengatakan bahwa ketua KAN Lubuk Kilangan sedang tidak berada di tempat, kemudian peneliti memperkenalkan diri dan menjelaskan maksud kedatangan kepada sekretaris KAN Lubuk Kilangan. Beliau kemudian memberikan saran untuk menghubungi ketua KAN terlebih dahulu dengan memberikan nomor *handphone* ketua KAN Lubuk Kilangan. Peneliti kemudian menghubungi ketua KAN Lubuk Kilangan dan beliau bersedia ditemui pada keesokan harinya.

Peneliti kembali lagi ke Kantor KAN Lubuk Kilangan dan bertemu dengan Ketua KAN Lubuk Kilangan. Kepada beliau peneliti memperkenalkan diri serta menyampaikan maksud dan tujuan peneliti menemui Ketua KAN Lubuk Kilangan.

Peneliti melakukan wawancara dengan Ketua KAN Lubuk Kilangan selama lebih kurang setengah jam. Saat wawancara berlangsung, beliau menyampaikan informasi-informasi yang diketahui secara panjang lebar, kemudian beliau menyarankan untuk menemui mantan Sekretaris KAN Lubuk Kilangan karena dianggap lebih banyak mengetahui mengenai permasalahan dalam penelitian tersebut. Dari sinilah awal peneliti mengganti metode penelitian dari *purposive sampling* ke *snowballing*. Ketua KAN kemudian memberikan alamat dan nomor *handphone* mantan Sekretaris KAN tersebut.

Peneliti kemudian menemui Mantan Sekretaris KAN Lubuk Kilangan dengan menghubungi terlebih dahulu guna menyesuaikan jadwal antara peneliti dengan beliau. Setelah melakukan wawancara dengan mantan Sekretaris KAN tersebut, peneliti meminta saran kepada beliau mengenai siapa informan selanjutnya yang bisa ditemui terkait dengan permasalahan yang sedang diteliti. Beliau kemudian memberi 2 informan yang dianggap terlibat dalam permasalahan yang sedang dibahas oleh peneliti.

Peneliti kemudian melanjutkan penelitian ke Dinas Perdagangan Kota Padang. Sebelum melakukan wawancara dan mengambil data, peneliti menyerahkan terlebih dahulu surat rekomendasi dari KESBANGPOL ke Kantor Dinas Perdagangan Kota Padang sebagai izin untuk pengambilan data dan melakukan wawancara mendalam.

Pada pertemuan pertama peneliti melakukan wawancara di Kantor Dinas Perdagangan Kota Padang. Selain melakukan wawancara, peneliti juga mendapatkan dokumen yang terkait dengan penelitian. Dokumen ini menjadi

temuan peneliti yang dapat dijadikan sebagai bahan studi dokumen penelitian. Kemudian peneliti juga melakukan wawancara ke UPTD Pasar Bandar Buat yang merupakan organisasi di bawah Dinas Perdagangan Kota Padang.

Kesulitan dalam melakukan penelitian ini adalah sulitnya mengontrol jawaban-jawaban dari informan penelitian, terutama informan dari Nagari Lubuk Kilangan. Ini dikarenakan pada penelitian ini juga menyangkut konteks sejarah pada Nagari Lubuk Kilangan dan Pasar Bandar Buat. Kesulitan lain yang dirasakan adalah, sulitnya menemukan waktu yang tepat hingga tidak dapat ditemui karna kesibukan dan permasalahan yang sedang dialami oleh informan. Penelitian yang peneliti lakukan pada saat itu bertepatan dengan kunjungan Presiden Republik Indonesia Ir. H. Joko Widodo yang datang ke Kota Padang untuk meresmikan pembangunan blok-blok Pasar Raya Kota Padang saat itu. Sebelum kedatangan Presiden Republik Indonesia, Dinas Perdagangan Kota Padang diturunkan kelapangan melakukan piket gabungan untuk menertibkan pedagang Pasar Raya Kota Padang yang masih berjualan di jalan dan trotoar sekitar Pasar Raya Kota Padang. Maka dari itu, peneliti sulit menyesuaikan waktu dengan informan penelitian dari Dinas Perdagangan Kota Padang, hingga kantor UPTD Pasar Bandar Buat yang sering tutup dengan pemberitahuan sedang turun ke lapangan.

Pada kasus penelitian ini, peneliti melihat situasi yang masih kontroversial antara Nagari Lubuk Kilangan, Pemerintah Kota Padang, Investor, dan Pedagang Pasar Bandar Buat. Salah satu buktinya adalah saran dari Ketua UPTD Pasar Bandar Buat untuk tidak mewawancarai pihak investor karena masih terlibat dengan kasus pembangunan dan pengembangan Pasar Bandar Buat. Pada

penelitian ini juga tidak semua informan dapat peneliti temui, berbagai alasan dari beberapa informan membuat peneliti memutuskan untuk mengganti informan penelitian, salah satu alasannya yaitu terkait dengan polemik yang sedang terjadi di Pasar Bandar Buat baik itu dengan pengelola pasar, investor, hingga keberadaan Bank Nagari yang izin pembangunannya dipertanyakan oleh pihak Nagari Lubuk Kilangan karena berdiri diatas tanah Pasar Bandar Buat.

1.6.8 Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian dapat diartikan sebagai *setting* atau konteks sebuah penelitian. Tempat tersebut tidak selalu mengacu pada wilayah, tetapi juga kepada organisasi dan sejenisnya (Afrizal, 2014:128). Penelitian ini mengambil lokasi di Pasar Bandar Buat Kecamatan Lubuk Kilangan. Pasar Bandar Buat termasuk salah satu pasar wilayah yang ada di Kota Padang, karena terletak di gerbang sebelah timur Kota Padang. Sebagaimana yang telah dijelaskan pada latar belakang permasalahan, sebelum dikelola oleh Pemerintah Kota Padang, Pasar Bandar Buat merupakan pasar milik kaum nagari Lubuk Kilangan. Bergabungnya Kecamatan Lubuk Kilangan menjadi bagian perluasan Kota Padang menyebabkan semua aset yang berada di Kecamatan Lubuk Kilangan diambil-alih oleh Kota Padang, salah-satunya Pasar Bandar Buat.

1.6.9 Definisi Operasional Konsep

- Proses

Proses adalah urutan pelaksanaan atau kejadian kilas balik penyerahan pengelolaan pasar nagari Bandar Buat dengan mengacu kepada informasi serta didukung oleh data sekunder.

- Penyerahan

Penyerahan pengelolaan pasar nagari Bandar Buat dari Nagari Lubuk Kilangan ke Pemerintah Kota Padang (dahulu namanya Pemerintah Kotamadya Padang).

- Pasar

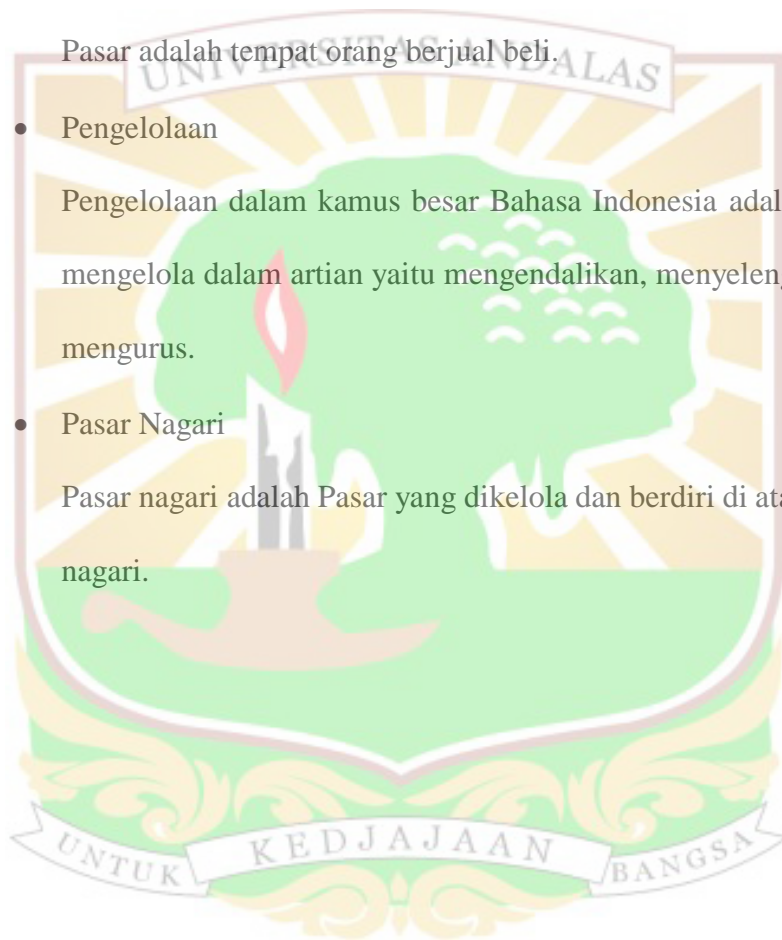
Pasar adalah tempat orang berjual beli.

- Pengelolaan

Pengelolaan dalam kamus besar Bahasa Indonesia adalah orang yang mengelola dalam artian yaitu mengendalikan, menyelenggarakan, atau mengurus.

- Pasar Nagari

Pasar nagari adalah Pasar yang dikelola dan berdiri di atas tanah ulayat nagari.



1.6.10 Jadwal Penelitian

Penelitian ini dirancang sedemikian rupa sebagaimana pada tabel berikut :

Tabel 1.3

Jadwal Penelitian

No	Nama Kegiatan	Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2017-2018								
		Sep	Okt	Nov	Des	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei
1	Seminar Proposal									
2	Perbaikan Proposal									
3	Penelitian Lapangan									
4	Analisis data dan penulisan skripsi									
5	Ujian skripsi									

Sumber: Data Premier 2018